

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang digunakan oleh pihak-pihak kepentingan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan (Hery, 2014). Pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan menggunakan laporan keuangan untuk mengetahui sebuah informasi data keuangan terkait kinerja atau aktivitas keuangan perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan dan data ini disajikan dalam suatu laporan keuangan. Dengan kualitasnya laporan keuangan akan bermanfaat bagi para penggunanya.

Namun penyusunan laporan keuangan tidak hanya diperuntukkan bagi sebuah perusahaan saja, tetapi dalam pemerintahan pusat maupun daerah juga diperlukan suatu penyusunan laporan keuangan. Menurut PP Nomor 71 tahun 2010, kualitas laporan keuangan yang baik harus memenuhi beberapa kriteria tertentu yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Untuk menilai laporan keuangan tersebut memenuhi kriteria laporan keuangan yang berkualitas atau tidak, maka diperlukan proses audit oleh auditor. Auditor akan mengevaluasi keakuratan dan keandalan informasi suatu laporan keuangan untuk menghasilkan sebuah opini auditor atas kewajaran laporan keuangan yang diaudit.

Menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, opini auditor terdiri dari 4 jenis, yaitu opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified*

*opinion*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*). Dengan adanya penilaian opini dari auditor, akan membantu pengguna laporan keuangan dalam menjamin suatu kewajaran laporan keuangan. Suatu laporan keuangan yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian menandakan bahwa laporan keuangan tersebut berkualitas.

Bagi pemerintah, laporan keuangan pusat maupun daerah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) atau standar akuntansi keuangan daerah (SAKD). Laporan keuangan pemerintah merupakan sebuah cerminan kinerja pemerintahan yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Jika kualitas laporan keuangan tidak baik, maka mencerminkan bahwa kinerja pemerintahan yang buruk dan begitu pula sebaliknya.

Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dapat melakukan pengevaluasian pada bagian internal, seperti melaksanakan kegiatan diklat/bimtek pemerintah daerah yang berhubungan dengan laporan keuangan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta keterampilan dibidang keuangan pemerintahan daerah agar meningkatkan kinerja yang professional dan berkompeten. Namun dengan adanya diklat/bimtek yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, masih terdapat beberapa hasil laporan keuangan yang kurang atau tidak berkualitas. Berikut ini beberapa faktor yang akan mewujudkan suatu laporan keuangan yang berkualitas.

Faktor pertama yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai variabel independen yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Menurut Priyono dan

Marnis (2008), Sumber Daya Manusia didefinisikan sebagai kemampuan dasar individu yang terdiri dari daya pikir dan daya fisik. Sumber daya manusia yang bermasalah pada daya pikir atau daya fisiknya akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Maka diperlukan suatu sumber daya manusia yang aktif dan berkompeten dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga, penulis memilih variabel independen ini menjadi salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap kualitas LKPD.

Selanjutnya, faktor kedua yang akan digunakan sebagai variabel independen yaitu Sistem Pengendalian Internal. Menurut Peraturan Pemerintahan No.60 Tahun 2008 sistem pengendalian internal adalah

“proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melakukan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien akan membantu organisasi dalam menyusun dan menghasilkan laporan keuangan yang memadai dan berkualitas. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan terbebas dari salah saji material dan mendapatkan opini yang memuaskan. Namun sistem pengendalian internal yang tidak menerapkan metode atau kebijakan yang baik dan tegas akan mempengaruhi kinerja karyawan/anggota yang bekerja pada pemerintahan. Sehingga akan menimbulkan beberapa kelalaian pada Sistem Pengendalian Internal pemerintah yang berpengaruh pada kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dihasilkan.

Lalu, faktor ketiga yang akan digunakan sebagai variabel independen yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban sebuah organisasi atas misi untuk mencapai tujuan (Mardiasmo, 2005). Suatu karyawan/pegawai yang mengerti konsep etika yang terdapat pada administrasi publik pemerintahan dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap tindakan, keputusan dan kebijakan dalam melaksanakan tugasnya. Maka tidak akan terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam pekerjaannya. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat akan kinerja pemerintahan, menyebabkan banyak tuntutan masyarakat terhadap pemerintah pusat dan daerah. Sehingga akuntan publik harus dapat mempertanggungjawabkan laporan keuangan yang disajikan.

Faktor keempat yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagai variabel independen yaitu transparansi. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006, Pasal 4 ayat 7 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Maka dengan adanya sebuah transparansi dalam pelaporan keuangan akan mengurangi tingkat kecurangan dan akan lebih terbuka kepada masyarakat. Selain itu, dengan adanya transparansi dalam pengelolaan laporan keuangan akan memudahkan dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah dan tidak akan ada beberapa akun yang mengalami kelebihan pembayaran maupun kekurangan pembayaran atau melakukan pembayaran yang tidak sesuai.

Keempat variabel independen yang akan penulis gunakan, sudah pernah diuji pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada penelitian

terdahulu. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wardani (2017) menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD Kabupaten Labuhanbatu, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap kualitas LKPD Kabupaten Labuhanbatu dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah serta pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya, pada penelitian terdahulu oleh Ningrum (2018) menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD Kabupaten Kebumen, sedangkan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD Kabupaten Kebumen.

Pada penelitian oleh Hamsinar (2017) menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi kebijakan publik berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pinrang. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Septiningtyas (2017) menyimpulkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD di Kabupaten Kendal. Sedangkan pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD di Kabupaten Kendal. Selanjutnya, pada penelitian Lubis (2018) menyimpulkan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Medan.

Penelitian ini, menggunakan empat variabel independen yang telah diteliti oleh kelima penelitian terdahulu yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan laporan keuangan. Keempat variabel tersebut akan diuji kembali terhadap kualitas laporan keuangan, karena keempat variabel tersebut dapat mewakili masalah yang menyebabkan kurang baiknya kualitas laporan keuangan. Selain itu, penggabungan keempat variabel independen yang penulis uji dalam penelitian ini merupakan ide dari penulis sendiri yang mengacu pada penelitian terdahulu.

Penulis memilih Kabupaten Bantul sebagai subjek penelitian karena selama 10 tahun berturut-turut dari tahun 2012-2021 Kabupaten Bantul memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK. Sesuai dengan SIARAN PERS yang dikeluarkan oleh Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan, BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021 kepada Ketua DPRD Kabupaten Bantul dan Bupati Bantul pada Kamis 21 April 2022. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul TA 2021 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun BPK menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, walaupun tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan yaitu pengelolaan izin dan pajak reklame belum tertib dan pengelolaan piutang daerah belum memadai. (Sumber : <https://yogyakarta.bpk.go.id/laporan-keuangan->

pemerintah-daerah-kabupaten-gunungkidul-dan-kabupaten-bantul-tahun-anggaran-2021-mendapat-opini-wajar-tanpa-pengecualian/).

Penelitian ini akan dilakukan untuk mengetahui apakah pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan laporan keuangan mempengaruhi kualitas LKPD Kabupaten Bantul.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul?
2. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul?
3. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul?
4. Apakah Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggabungkan berbagai faktor yang melatarbelakangi masalah kualitas LKPD yaitu pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan yang kemudian akan diuji pengaruhnya terhadap keberhasilan yang ada di Kabupaten Bantul, untuk mengeneralisasikan dengan penelitian



sebelumnya terkait kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kabupaten Bantul.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak lain, berupa:

1. Manfaat teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber ilmu yang baru atau dapat melengkapi teori yang sudah ada mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.
2. Manfaat praktik, hasil dari penelitian diharapkan dapat berguna bagi pemerintahan khususnya pada pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman dan memperbaiki praktik yang sudah ada sehingga dapat mengatasi permasalahan mengenai penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang kurang berkualitas.
3. Manfaat kebijakan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam pembuatan kebijakan pemerintah daerah yang berkualitas, agar terwujud sebuah laporan keuangan daerah yang berkualitas.